

**EVALUASI TINGKAT HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA
PERUSAHAAN MITRA DENGAN KELOMPOK MITRA
(Studi Kasus: Perusahaan Mitra PKP dengan Kelompok Petani
Ternak Di Kabupaten Padang Pariaman)**

SKRIPSI



OLEH:

**ALMAISARAH
03 164 044**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Peternakan

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

2008

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak krisis moneter berkepanjangan yang berlanjut dengan krisis ekonomi, kondisi perekonomian Indonesia semakin mengalami kemunduran, namun dalam kondisi perekonomian seperti sekarang ini sektor peternakan harus mampu bertahan dan karena itu di upayakan dapat menjadi motor penggerak pembangunan sub sektor pertanian dimasa yang akan datang dan subsektor peternakan dapat dibangun menjadi sektor andalan dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.

Dalam tahap penyelamatan yang saat ini terus bergerak ke arah tahap pengembangan, maka peran informasi investasi mengenai peluang usaha atau investasi melalui penanaman modal perlu terus ditingkatkan karena mengingat sumber pembiayaan pemerintah yang semakin terbatas. Dalam meningkatkan skala usaha petani peternak untuk penambahan modal perlu dilakukan pola Kemitraan antara petani peternak dengan pengusaha ternak

Pengembangan usaha dibidang sub sektor peternakan diadakan dengan pendekatan Agribisnis dengan menghendaki adanya kerja sama usaha dan saling keterkaitan dibidang peternakan yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar atau usaha menengah (pengusaha ternak) dengan memperhatikan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan petani peternak dan hubungan kerja seperti ini disebut juga dengan kemitraan. Untuk lebih memahami dan menjadi dasar atau pegangan dari kegiatan Kemitraan bagi pengusaha dan petani peternak atau peternak, maka

pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kemitraan bagi pengusaha dan petani dalam berbisnis.

Berdasarkan PP R.I No.44 Th 1997 (tentang kemitraan), **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Untuk menindak lanjuti pelaksanaan PP R.I No.44 Th 1997 ini dikeluarkan Kepmentan No.940/Kpts/OT.210/10/97, tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian yang mempunyai pertimbangan yaitu :

- a) Bahwa kemitraan usaha merupakan salah satu upaya untuk tercapainya pembangunan pertanian modern yang berorientasi agribisnis
- b) Bahwa dalam pengembangan kemitraan usaha, diperlukan adanya pedoman kemitraan usaha bagi pelaku agribisnis
- c) Bahwa atas dasarnya hal diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian.

Pembangunan sub-sektor Peternakan merupakan bagian dari pembangunan Pertanian, yakni untuk mencapai masyarakat sejahtera maka pembangunan perekonomian dikembangkan dengan bertumpu pada sektor yang didukung oleh Sumber Daya Domestik dan memiliki peluang usaha, yaitu sektor agribisnis, yang merupakan sinergi antara pertanian, agroindustri dan jasa-jasa yang menunjang pertanian. Hal ini tercakup dalam GBHN 1999-2004 .

Untuk pelaksanaan Kepmentan No.940/Kpts/OT.210/97, dikeluarkan Kepmentan No.944/Kpts/OT.210/10/97, tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian yang menyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan kemitraan usaha, perlu dinilai tingkat hubungan kemitraan usaha, sehingga dapat diketahui masalah dan peluang pengembangannya.

Pada BAB III Kepmentan no.944/Kpts/OT.210/10/97 ini dikatakan bahwa, berdasarkan proses manajemen kemitraan dan manfaatnya, tingkat hubungan kemitraan usaha antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra dapat dibagi dalam empat kategori tingkat hubungan kemitraan yaitu tingkat:

- (1) Kemitraan Pra Prima,
- (2) Kemitraan Prima
- (3) Kemitraan Prima Madya
- (4) Kemitraan Prima Utama.

Tingkat kemitraan terendah adalah Kemitraan Pra Prima, selanjutnya meningkat menjadi Prima, kemudian meningkat menjadi Prima Madya, dan tingkat tertinggi adalah Kemitraan Prima Utama. Pemerintah dalam menggalakan kemitraan ini telah terlihat adanya perusahaan peternakan yang membina petani ternak dalam bentuk kerjasama antara :

- (a) Inti-Plasma,
- (b) Sub Kontrak
- (c) Dagang Umum
- (d) Keagenan
- (e) Bentuk-bentuk lain; misalnya Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada usaha peternakan ayam broiler pola kemitraan perusahaan PKP (Primatama Karya Persada) beserta plasmanya Di Kabupaten Padang Pariaman dapat disimpulkan Bahwa :

Nilai tingkat hubungan kemitraan antara perusahaan mitra PKP (Primatama Karya Persada) dengan kelompok mitranya berjumlah sebesar 770. Dan dilihat dari hasil yang diperoleh tersebut maka Berdasarkan Kepmentan No.944/Kpts/OT.210/10/97, tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian, maka pola kemitraan ini termasuk tingkat kemitraan Prima Utama, yang merupakan tingkat tertinggi dan sudah sesuai dengan pedoman.

B. Saran

1. Hendaknya dalam menjalankan usaha ternak broiler pola kemitraan ini harus mempunyai perencanaan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan mitra bersama kelompok, agar usaha ini dapat berjalan seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan mitra dan kelompok mitra (plasma).
2. Isi kontrak kerjasama harusnya lengkap yakni meliputi Aspek kualitas, produktivitas, kontinuitas hasil, harga , sistem pembayaran, saprodi, permodalan dan sanksi, agar pelaksanaan kerjasamanya jelas dan terarah sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antar perusahaan mitra (inti) dengan kelompok mitra (plasma).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, 1982. Ilmu Usaha Tani. Penerbit Alumni, Bandung.
- Aji, Firman dan Sirait S, Martin, 1990. Perencanaan dan Evaluasi Suatu Sistem Dalam Perencanaan. Bumi Aksara, Jakarta.
- Anam, B. 2003. Per-Undang-Undangan dan Kebijakan Pembangunan Peternakan. Universitas Andalas, Padang
- Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat. 2001. Pedoman Kebijakan dan Penjelasan Pola Kemitraan Usaha Peternakan, Padang.
- Hafsah, J. 2000. Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Huscin, U. 2003. Metode Riset Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jufri, A. 2002. Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangatas. Makalah. www.google.co.id. Tanggal 30 hari Kamis jam 19.15.
- Kadarsan, H.W. 1995. Keuangan Pertanian dan Pembiayaan Perusahaan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartasapoetra, A.G. 1988. Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian. Bina Aksara, Jakarta.
- Khaerul, F. 1994. Kemitraan Dalam Perkembangan Agribisnis Di Indonesia. Makalah Seminar "Manajemen agribisnis". Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT.210/10/1997. Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, Jakarta.
- Keputusan Menteri Pertanian No.944/Kpts/OT.210/10/1997. Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian. Jakarta.
- Kopelman, R.E. 1986. Managing Productivity In Organization; a Practical, People Oriented Perspective; Mc. Graw. Hill Book, Co, Singapura.
- Mardikanto, T. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret Universitas Press, Surakarta.
- Michael, P.T. 2000. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kelima. Bumi Aksara, Jakarta.